

**PERTANGGUNGJAWABAN ETIK TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh :

FEBRIAN DIO SUSANTO PUTRA
NPM : 22300052

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN ETIK TERHADAP
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA.



OLEH:
FEBRIAN DIO SUSANTO PUTRA
22300052

SURABAYA, 10 DESEMBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. Edi Krishariyanto, S.H., M.H., CPM., Adv.

PEMBIMBING

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN ETIK TERHADAP
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

**DISUSUN OLEH:
FEBRIAN DIO SUSANTO PUTRA
22300052**

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA
TANGGAL 22 DESEMBER 2025 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ahmad Basuki, S.H., M.H.

Ketua Penguji

1. 

Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H

Penguji

2. 

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Penguji

3. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas besar kasih dan anugerah-Nya yang telah menyertai saya sampai di titik ini, sehingga Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN ETIK TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ucapan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang antara lain yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H., CPM., Adv. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
3. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama pengerjaan skripsi.
4. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membekali saya dengan ilmu hukum serta membimbing dengan penuh dedikasi selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Seluruh staf pengajar dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan.

8. Kedua orang tua tercinta, Ayah Agus Susanto dan Ibu Suleha, serta seluruh saudara yang senantiasa memberikan dukungan moral, materil, semangat, serta doa selama penulis menempuh pendidikan ini.
9. Sahabat – Sahabat penulis selama dibangku perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemani, menghibur, memberikan semangat, serta doa dalam proses pengerjaan skripsi penulis.
10. Terima Kasih kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa fakultas Hukum dan seluruh anggota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang menjadi keluarga saya, saat saya jauh dari rumah, yang telah menjadi tempat saya berkembang dan bertumbuh.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran maupun dukungan.

Surabaya, 9 Desember 2025

Penulis



Febrian Dio Susanto Putra

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febrian Dio Susanto Putra
NPM : 22300052
Alamat : Jl. Kandangan Gunung Darma II no 25 Surabaya
Email : febriansusanto87@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN ETIK TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, 9 Desember 2025

Yang menyatakan



Febrian Dio Susanto Putra

NPM : 22300052

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Etik terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam Kasus Penyelundupan Narkotika”. Penelitian ini mengkaji mekanisme pertanggungjawaban etik terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dalam penyelundupan narkotika, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Permasalahan yang dikaji meliputi mekanisme penerapan sanksi etik terhadap anggota Polri dan penilaian terhadap penerapan sanksi etik tanpa melalui proses pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban etik terhadap anggota Polri dalam kasus penyelundupan narkotika dilaksanakan melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri dengan klasifikasi pelanggaran berat yang dapat berujung pada sanksi administratif hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, penerapan sanksi etik tanpa disertai proses pidana berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip equality before the law dan konsep double track system, sehingga penegakan sanksi etik seharusnya tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana demi menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Etik, Anggota Polri, Penyelundupan Narkotika, Kode Etik Profesi Polri.

ABSTRACT

This research is entitled "Ethical Accountability of Members of the Indonesian National Police in Cases of Narcotics Smuggling." The study examines the mechanism of ethical accountability applied to members of the Indonesian National Police (Polri) involved in narcotics smuggling and assesses its conformity with the applicable legal framework and the principle of equality before the law. The issues addressed include the mechanism for imposing ethical sanctions on police officers and the appropriateness of imposing such sanctions without criminal proceedings.

This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis focuses on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Government Regulation Number 2 of 2003 on Police Discipline, and Regulation of the Indonesian National Police Number 7 of 2022 on the Professional Code of Ethics.

The results indicate that ethical accountability in cases of narcotics smuggling involving police officers is implemented through the Police Code of Ethics Commission, where such conduct is classified as a serious ethical violation and may result in administrative sanctions, including dishonorable discharge. However, the imposition of ethical sanctions without accompanying criminal proceedings may lead to inconsistency with the principle of equality before the law and the concept of the double track system. Therefore, the enforcement of ethical sanctions should not negate criminal liability in order to ensure legal certainty and justice.

Keywords: *Ethical Accountability, Indonesian National Police, Narcotics Smuggling, Police Code of Ethics.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Pertanggungjawaban Hukum	7
1.5.2 Sanksi Etik	9
1.5.3 Anggota Polri	11
1.5.4 Penyelundupan Narkotika	14
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	15
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	17
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	19
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	19
BAB II MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ETIK TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA	22
2.1 Pengertian dan Konsep Pertanggungjawaban Etik	22
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Etik	22

2.1.2 Konsep Pertanggungjawaban Etik dalam Profesi Kepolisian	25
2.1.3 Perbedaan Pertanggungjawaban Etik, Pidana, dan Disiplin	28
2.1.4 Tujuan Pertanggungjawaban Etik	32
2.2 Dasar Hukum Pertanggungjawaban Etik	36
2.2.1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian	36
2.2.2 Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri	38
2.2.3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP dan KKEP)	40
2.3 Mekanisme Penegakan Kode Etik Sesuai Perpol no 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri	44
2.4 Jenis dan Bentuk Sanksi Etik Terhadap Anggota Polri	58
2.4.1 Jenis Sanksi Etik terhadap Anggota Polri	58
2.4.2 Bentuk Sanksi Etik terhadap Anggota Polri	60
2.5 Prinsip- Prinsip Penegakan Etik Polri	63
BAB III KESESUAIAN PENERAPAN SANKSI ETIK TANPA PROSES PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA	66
3.1 Kesesuaian Penerapan Sanksi Etik dalam Kasus Penyelundupan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia	66
3.1.1 Jenis Sanksi Etik yang Dijatuhkan terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia	67
3.1.2 Proses Pemeriksaan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP)	70
3.1.3 Dasar Hukum Kesesuaian Penerapan Sanksi Etik oleh Institusi Kepolisian Republik Indonesia	72
3.2 Kesesuaian Penerapan dengan Peraturan Perundang-undangan	75
3.2.1 Kesesuaian Mekanisme Pertanggungjawaban Etik dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia	75

3.2.2 Kesuaian Penerapan Tidak Dilaksanakannya Proses Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	77
3.2.3 Kesuaian Penerapan terhadap Prinsip Equality Before the Law.....	80
3.2.4 Kesesuaian Penerapan Prinsip <i>Double Track System</i>	82
BAB IV PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Saran.....	86
DAFTAR BACAAN	88